



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BANK INDONESIA (BI)  
**UNIT KERJA** : DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : FARIDA PERANGINANGIN
2. Jabatan : KEPALA DEPARTEMEN
3. NHK : 271724

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **21.702.200.000**

1. Bangunan Seluas 168 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/300 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah Seluas 570 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 252 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 267 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 361 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 7.702.200.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **1.775.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 250CC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. MOBIL, BMW 520D Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. MOBIL, LEXUS RX300 JEEP Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.



1.150.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 1.755.000.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. 11.216.797.020

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 11.016.845.583

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 47.465.842.603

**III. HUTANG**

Rp. 177.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 47.288.842.603

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.